



RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

I. PENDAHULUAN

Sebagai ibukota negara serta pusat kegiatan, Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dampak terhadap berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan akibat meningkatnya limbah padat, cair, gas hasil dari kegiatan aktivitas kegiatan usaha. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas lingkungan telah terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah dan udara sehingga pencemaran Jakarta sudah mencapai ambang yang cukup serius. Menanggapi kondisi tersebut, diperlukan suatu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta yang dapat menjadi gambaran kondisi lingkungan hidup serta informasi faktual tentang kondisi kualitas lingkungan hidup Jakarta. Penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. ANALISIS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Analisis kondisi lingkungan hidup daerah dilakukan dengan menggunakan model DPSIR. Pada model ini, aktivitas manusia dilihat sebagai pendorong (*driver force*) terjadinya tekanan (*pressure*) terhadap ekosistem, yang mempengaruhi terjadinya perubahan di ekosistem (*state*) yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan manusia (*impact*), untuk kemudian ditanggapi

melalui berbagai strategi penanganan risiko (*response*). Persoalan lingkungan hidup DKI Jakarta berawal dari pengembangan perkotaan yang selanjutnya memberikan tekanan pada tata guna lahan dan berdampak pada kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, tata kelola, dan lain-lain.

2.1 Perkotaan

2.1.1 *Driving Forces*

Pertumbuhan DKI Jakarta dapat dilihat dari dua faktor, yaitu perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan aktifitas perekonomian. Penduduk Jakarta meningkat sebanyak dua kali lipat dalam kurun waktu 1971-2019. Dari aspek perekonomian, Jakarta memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Secara statistik, pada 2010-2017 Jakarta merupakan kontributor terbesar terhadap PDB Nasional.

2.1.2 *Pressures*

Berbagai kegiatan perkotaan di Jakarta disertai dengan residu dari kegiatan domestik maupun domestik ini antara lain berupa limbah padat dan cair. Salah satu tantangan terbesar dari sampah di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. DKI Jakarta dalam hal kepedulian pengelolaan sampah memiliki nilai indeks 0,46 sehingga menempatkan DKI Jakarta dalam skala provinsi sebagai yang terbaik di Indonesia. Tantangan lain dari persampahan adalah pengelolaan sampah.

2.1.3 *States*

Proses pengelolaan persampahan dan air limbah di Jakarta pada dasarnya masih menggunakan sistem konvensional. Untuk pelayanan sampah, model pengelolaan masih menggunakan sistem

kumpul-angkut-buang, sementara untuk pengelolaan air limbah secara mayoritas masih menggunakan sistem *on-site*. Permasalahan sampah di Jakarta juga disebabkan adanya timbulan sampah di daerah hulu (di luar Jakarta) yang terbawa oleh sungai hingga masuk ke dalam jurisdiksi DKI Jakarta dan terakumulasi dengan sampah di internal Jakarta.

2.1.4 Impacts

Penumpukan sampah yang tidak tertangani serta pengolahan air limbah yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab utama pencemaran di sungai dan Teluk Jakarta. KLHK melaporkan pada tahun 2016, pencemaran di Teluk Jakarta bersumber dari limbah rumah tangga. Masih rendahnya keberhasilan proses pengolahan sampah pada tingkat produsen menyebabkan beban anggaran yang besar bagi pemerintah DKI untuk pengangkutan dan bea kompensasi TPA Bantar Gebang.

2.1.5 Responses

Beberapa kebijakan pada tingkat daerah yang menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan persampahan dan air limbah, antara lain: Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, Perda Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Kep. Gubernur No. 45 tahun 1992 tentang Sistem Perpipaan Pengolahan Air Limbah. Dalam hal perencanaan kegiatan, DKI berencana mencari alternatif teknologi terbaru yang dapat menggantikan peran TPA dalam proses akhir pengolahan sampah. Pada sisi pengolahan air limbah, pemerintah DKI telah menyusun masterplan sistem jaringan air limbah yang dikenal dengan proyek *Jakarta Sewerage System*.

2.2 Tata Guna Lahan

2.2.1 *Driving Forces*

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang disertai dengan berbagai aktifitas yang berlangsung di DKI Jakarta, luasan kawasan terbangun berkembang dari 20,34% pada tahun 1978 menjadi 90,85% pada tahun 2015 (Yanto, 2016). Perkembangan kawasan terbangun mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada era tahun 1983-1997 hingga mencapai 42% seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk DKI Jakarta sejumlah kurang lebih dua juta jiwa.

2.2.2 *Pressures*

Adanya pertumbuhan penduduk DKI Jakarta menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan lahan untuk dapat menampung berbagai aktivitas penduduk Jakarta. Secara keseluruhan lahan di Jakarta merupakan lahan budidaya dimana penggunaan lahan terbesar masih didominasi untuk guna lahan perumahan dan permukiman. Dalam kurun waktu yang sama, perubahan terbesar terlihat dalam hal peningkatan fasilitas umum, komersil dan pemerintahan, dan lahan tidak terbangun. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya lahan tidak terbangun di Jakarta.

2.2.3 *States*

Dinamika penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menyebabkan Jakarta mengalami keterbatasan ketersediaan lahan. Adanya keterbatasan lahan mengakibatkan adanya peningkatan intensitas penggunaan lahan ditandai dengan berkembangnya bangunan tinggi di Jakarta. Keterbatasan lahan juga menyebabkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Jakarta.

2.2.4 Impacts

Keterbatasan lahan menyebabkan perkembangan Jakarta meluas hingga ke wilayah di sekitar Jakarta yang menyebabkan terjadi *urban sprawl* di pinggiran Jakarta dan sekitarnya. Adanya tumpang tindih kepentingan pembangunan, keterbatasan lahan, serta *urban sprawl* berdampak pada terjadinya ketidakefisienan dalam pemanfaatan ruang di Jakarta. Keterbatasan ruang terbuka hijau menyebabkan daya dukung Jakarta dalam menghadapi pencemaran udara semakin terbatas. Hal ini juga memicu meningkatnya efek pemanasan di dalam kota yang kemudian berdampak terhadap kualitas hidup penduduknya serta turut berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan ekstrem di Jakarta.

2.2.5 Responses

DKI Jakarta telah memiliki rencana tata ruang sebagai pedoman penggunaan lahan. Rencana tata ruang di DKI Jakarta terdiri dari rencana makro (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW), rencana meso (Rencana Detail Tata Ruang/RDTR), hingga rencana mikro (*Urban Design Guide Line*, UDGL/Panduan Rancang Kota). Tidak hanya rencana tata ruang, Jakarta juga memiliki kebijakan sangat lengkap dalam hal pengaturan pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mengatur penggunaan lahan, tetapi juga mengatur mengenai intensitas bangunan di Jakarta.

2.3 Kualitas Air

2.3.1 Driving Forces

Terdapat tiga faktor yang menjadi driving forces kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, yakni: (1) Pertumbuhan aktivitas perekonomian; (2) fenomena urbanisasi dan (3) terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi dan air bersih. Urbanisasi

menjadi beban tersendiri bagi pelayanan utilitas publik. Di samping itu, aktivitas di wilayah hulu DAS BODETABEK menjadi *driving forces* tambahan. Alih fungsi lahan marak terjadi di wilayah hulu sehingga kerap terjadi erosi dan menimbulkan sedimentasi di badan air.

2.3.2 Pressures

Pressures kualitas air di Provinsi DKI Jakarta muncul akibat aktivitas perekonomian di wilayah Jabodetabek. Aktivitas perekonomian manusia akan menghasilkan limbah. Beban limbah ke lingkungan yang tidak mampu diasimilasi oleh alam serta didukung ketersediaan sarana prasarana pengolahan limbah yang handal akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran 17 sungai yang ada di DKI Jakarta sebagian besar diakibatkan oleh sampah baik yang tidak tertangani maupun sampah yang dibuang sembarangan yang kemudian masuk ke badan air.

2.3.3 States

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemantauan kualitas air yang digunakan sebagai dasar evaluasi pencemaran air, yakni metode *Pollution Index (PI)*. Selanjutnya, nilai indeks tersebut akan digunakan sebagai Indeks Kualitas Air (IKA). Tren kualitas air (IKA) Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2018. Di tahun 2012, IKA DKI Jakarta sebesar 41,05. Di tahun 2018, nilai IKA DKI Jakarta menjadi 31,43.

2.3.4 Impacts

Gangguan kesehatan adalah salah satu *impacts* dari penurunan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta. Di samping gangguan kesehatan, *impacts* lainnya adalah kekurangan air bersih, terutama

pada musim kemarau. Masih terbatasnya cakupan akses air minum perpipaan dari PDAM menjadikan 73% rumah tangga di Jakarta harus mengandalkan air tanah atau air sungai sebagai sumber air bersihnya. Lebih lanjut, tingginya penggunaan air tanah berpengaruh pada laju penurunan laju muka tanah.

2.3.5 Responses

Dalam mengatasi isu penurunan kualitas air, Pemda DKI Jakarta menjalankan program pembangunan layanan pengelolaan air limbah domestik dan program kerjasama penanganan kuantitas dan kualitas air permukaan dengan daerah yang berbatasan (Jawa Barat dan Banten). Program pembangunan layanan pengelolaan air limbah domestik disusun untuk mengatasi isu akses masyarakat terhadap layanan SPALD. Sementara itu, program kerjasama untuk penanganan kuantitas dan kualitas air permukaan dengan daerah yang berbatasan (Jawa Barat dan Banten) ditujukan untuk menambah volume air yang dapat dimanfaatkan karena meningkatnya kuantitas dan kualitas air sungai.

2.4 Kualitas Udara

2.4.1 Driving Forces

Kebutuhan warga Jabodetabek akan transportasi menjadi *driving force* utama kualitas udara ibu kota. Di samping kebutuhan transportasi, kebutuhan terhadap energi yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya menjadi *driving force* terhadap kualitas udara Jakarta. Hal lainnya yang menjadi *driving forces* kualitas udara Jakarta adalah kebutuhan terhadap infrastruktur dan bangunan.

2.4.2 Pressures

Pressure kualitas udara Kota Jakarta adalah pencemaran udara perkotaan yang bersumber dari empat kegiatan utama, yakni transportasi darat, pembangkitan listrik & pemanas, pembakaran domestik serta pembakaran industri. Sebagian besar emisi *Black Carbon* (BC) dihasilkan dari transportasi darat. Buangan emisi dari industri dan pembangkit listrik adalah hal berikutnya yang turut menjadi *pressures* bagi kualitas udara ibu kota.

2.4.3 States

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara di beberapa titik pemantauan. Angka Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan yang berarti kualitas udara ambien DKI Jakarta mengalami perbaikan jika dilihat dari sisi parameter NO₂ dan SO₂. Tren perbaikan kualitas udara ambien hanya terjadi di wilayah pemantauan DKI1 – Bundaran HI.

2.4.4 Impacts

Pencemaran udara perkotaan yang berimplikasi pada turunnya kualitas udara ambien perkotaan menimbulkan beberapa dampak (*impacts*), diantaranya adalah gangguan kesehatan, penurunan estetika kota, dan hujan asam. Penurunan estetika kota dan hujan asam adalah dua dampak dari penurunan kualitas udara ambien yang saling terkait antara satu sama lain.

2.4.5 Responses

Pemprov DKI Jakarta telah mengimplementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005, seperti: pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD), penggunaan BBG bagi angkutan umum, pengawasan emisi sumber tidak bergerak, kawasan Dilarang Merokok (KDM), serta kebijakan yang Mendorong

Pembatasan Penggunaan Kendaraan Pribadi, seperti Kawasan Ganjil Genap dan Pajak Progresif Kendaraan. Pada tahun 2018 dilakukan pula e-uji emisi berbasis android, pengembangan infrastruktur pejalan kaki yang nyaman, pengembangan transportasi masal, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.5 Risiko Bencana

2.5.1 *Driving Forces*

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman serta fasilitas dasar perkotaan pendukungnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut berdampak terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan kebutuhan lahan.

2.5.2 *Pressures*

Tekanan terhadap sumber daya alam di DKI Jakarta untuk menunjang kebutuhan penduduk dan aktivitas ekonominya mengakibatkan kondisi dan kualitas lingkungannya mengalami penurunan. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan untuk menunjang kebutuhan air bersih penduduk DKI Jakarta berakibat pada penurunan permukaan tanah serta dapat berpotensi menimbulkan krisis air tanah. Selain itu, adanya pemanfaatan lahan yang dialokasikan untuk area resapan air mengakibatkan air tidak terserap oleh tanah sehingga menimbulkan banjir.

2.5.3 *States*

BPBD DKI Jakarta mencatat bahwa banjir adalah kejadian bencana alam yang sering dialami masyarakat. Tren kejadian bencana di DKI Jakarta dapat menjadi acuan dalam menggambarkan sebaran lokasi risiko bencana di DKI Jakarta. Sehingga dapat menjadi basis

dalam menunjukkan jumlah penduduk yang rentan terhadap risiko bencana.

2.5.4 Impacts

Kejadian banjir dan rob merupakan kejadian bencana yang paling sering dialami oleh penduduk DKI Jakarta. Sedangkan kejadian gempa bumi, longsor, dan cuaca ekstrem memiliki frekuensi kejadian relatif kecil.

2.5.5 Responses

Penanganan kejadian bencana di DKI Jakarta mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun BPBD DKI Jakarta setiap lima tahun. RPB DKI Jakarta memuat tentang arahan kebijakan dan penanganan risiko bencana yang terjadi di DKI Jakarta serta berbagai strategi dan upaya yang harus dilakukan mulai dari penyadaran masyarakat, pemetaan kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini, membentuk kelompok siaga bencana dan lain sebagainya.

2. 6 Tata Kelola

2.6.1 Driving Forces

Tata kelola lingkungan hidup yang baik di Jakarta sangat penting karena adanya faktor heterogenitas yang tinggi. Heterogenitas ini tidak hanya dalam hal aspek demografi (budaya, pendidikan) tetapi juga perekonomian (pekerjaan, tingkat kesejahteraan) dan kemampuan untuk berinteraksi (aksesibilitas). Tata kelola lingkungan hidup yang baik dapat memastikan perkembangan dan pembangunan Jakarta tetap akan memperhatikan keberlanjutan di masa depan.

2.6.2 Pressures

Pembangunan Jakarta yang didorong untuk mendukung kebutuhan aktifitas perekonomian menjadi salah satu faktor penekan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Perekonomian utama Jakarta telah bergeser dari sektor sekunder menjadi sektor tersier. Perkembangan menjadi sektor tersier ini tentunya membutuhkan tata kelola lingkungan hidup yang berbeda dibandingkan dengan sektor sekunder. Berkurangnya kegiatan ekstraksi serta pengolahan sumber daya alam seharusnya dapat disubstitusi menjadi faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan kota.

2.6.3 States

Perkembangan tata kelola yang lebih ke sektor tersier memicu tumbuhnya peran dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, serta korporasi. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah DKI juga telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan hukum menuju tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

2.6.4 Impacts

Keberadaan dan berbagai modal dasar yang dimiliki Jakarta masih belum dapat merubah kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Jakarta. Hasil penilain indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa Jakarta merupakan provinsi yang paling rendah kualitas lingkungannya, baik pada kualitas udara, air maupun tutupan lahan.

2.6.5 Responses

Pada saat ini, Jakarta secara aktif selalu mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk turut berdiskusi terhadap pelaksanaan pembangunan Jakarta. Upaya membuka komunikasi dua arah untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan Jakarta ini

seharusnya dapat menjadi jembatan untuk menuju tata kelola lingkungan hidup Jakarta yang yang lebih baik.

2.7 Lain-Lain

2.7.1 *Driving Force*

Kondisi sungai yang menjadi sumber air bersih masyarakat mengalami pencemaran oleh limbah (baik domestik maupun industri) dan belum mendapatkan penanganan yang sesuai. Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas air bersih yang dikonsumsi penduduk Jakarta yang menjadi tantangan terhadap perkembangan Jakarta dalam memenuhi pelayanan air bersih untuk masyarakat.

2.7.2 *Pressure*

Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai serta pencemaran oleh limbah domestik dan industri adalah penyebab penurunan kualitas sumber air bersih di Jakarta. Sementara itu, pengambilan air tanah yang tidak terkendali tanpa disertai dengan kawasan resapan telah memberikan dampak penurunan muka tanah Jakarta. Kejadian banjir yang dialami Jakarta setiap musim hujan serta faktor cuaca ekstrim memicu berbagai penyakit.

2.7.3 *States*

Lokasi-lokasi yang rawan terhadap kejadian banjir perlu dipantau secara rutin untuk mencegah serta mengurangi pasien yang akan menderita penyakit DBD dan leptospirosis. Dengan pemantauan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta dapat menyediakan suplai obat-obatan dan tenaga medis untuk penanganan awal terutama bagi

para pengungsi korban banjir. Selain itu, kebutuhan makanan dan pelayanan air bersih harus dibenahi untuk mengurangi dampak kejadian penyakit yang ditimbulkan.

2.7.4 Impacts

Kurangnya pelayanan dasar mengakibatkan kondisi lingkungan suatu wilayah akan menurun, sehingga memicu berbagai permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat. Gangguan kesehatan masyarakat terkait penurunan kondisi lingkungan yang mengakibatkan penyakit leptospirosis, DBD dan diare akan mengganggu kualitas sumber daya manusia, khususnya kesehatan anak. Penyakit diare yang terjadi berulang-ulang dan kronis dalam waktu lama pada anak-anak memungkinkan terjadinya *stunting*.

2.7.5 Responses

Pemerintah provinsi melakukan kegiatan fogging untuk mengantisipasi dan menghilangkan bakteri yang terbawa oleh banjir ke rumah penduduk. Selain itu, pemerintah daerah melakukan kegiatan kaporisasi air, lisolisasi (penyemprotan untuk menghindari leptospirosis), dan larvasidasi (pemusnahan larva).

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Banjir dan Rob

Banjir DKI Jakarta dibagi menjadi kategori dua kategori, yaitu (1) banjir *in-land* dan (2) banjir rob. Banjir di DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kaitan dengan wilayah penyangga yakni Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta, antara lain: penghentian pengambilan air tanah melalui penyediaan air perpipaan dengan target utama area pelayanan air bersih untuk DKI Jakarta di kawasan yang mengalami *land subsidence* signifikan,

pembangunan tanggul, meningkatkan luas RTH, normalisasi sungai Ciliwung, penerapan konsep sistem tata air, serta pengembangan sistem Pantura akan diintegrasikan sebagai bagian dalam penanggulangan banjir,antisipasi akan penurunan muka tanah dan antisipasi kenaikan muka air laut.

3.2 Pencemaran

Aktivitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Jabodetabek telah mendorong terjadinya pencemaran lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius bagi Kota Jakarta. Pencemaran lingkungan tersebut mencakup pencemaran air, baik situ/waduk, sungai, air tanah ataupun laut serta pencemaran udara. Secara umum, sumber pencemar yang mendegradasi kualitas air di Jakarta berasal dari air limbah domestik, air limbah industri, air limbah pertanian/perkebunan/peternakan, serta air hujan yang bercampur dengan air limbah. Adapun, pencemaran udara bersumber dari industri dan kendaraan bermotor.

3.3 Penanganan Sampah

Urbanisasi, pertumbuhan penduduk dan keterbatasan pelayanan persampahan adalah *driving force* utama dalam isu persampahan Kota Jakarta. jumlah penduduk dan perkembangan aktifitas perekonomian. Seiring dengan perkembangan Kota Jakarta, timbulan sampah Provinsi DKI Jakarta terus meningkat meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Padahal, pelayanan persampahan belum mencakup seluruh warga DKI Jakarta.

3.4 Permukiman Kumuh

Perkembangan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta distimulasi oleh tidak berimbangnya kapasitas lahan dengan jumlah

penduduk yang semakin bertambah. Disamping keterbatasan lahan, kurangnya kuantitas maupun kualitas rumah terjangkau juga menjadikan penduduk berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses rumah layak huni. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permukiman kumuh, diantaranya adalah pembangunan rumah susun, fasilitasi pembangunan perumahan swadaya, perluasan akses pembiayaan perumahan bagi penduduk miskin, serta penyediaan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota.

3.5 Kemacetan

Pusat pertumbuhan yang masih terpusat di DKI Jakarta mendorong penduduk sekitar (Jabodetabek) melakukan *commuting* ke pusat kota DKI Jakarta untuk beraktivitas. Di sisi lain, penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi serta jasa ojek online semakin menambah kemacetan DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI telah berupaya mengatasi kemacetan, diantaranya adalah: (1) penambahan rute, jadwal pengoperasian, serta unit angkutan umum berbasis jalan, (2) peningkatan kualitas layanan angkutan umum berbasis rel, (3) pembangunan angkutan umum masal berbasis rel, (4) pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, (5) pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di hari kerja, serta (6) pengadaan transportasi berbasis air.

IV. INOVASI DAERAH DALAM PEGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa inovasi yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi isu pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah: (1) kebijakan penghentian proyek reklamasi, (2) program pulauku nol sampah, (3) program Jak Lingko, (4) peningkatan pelayanan transportasi publik, (5) program

intermediate treatment facility (ITF), (6) Community Action Plan (CAP), (7) rekuisasi pelayanan air minum publik, (8) penjemputan limbah elektronik, serta (9) mitra konservasi.